

DAFTAR ISI

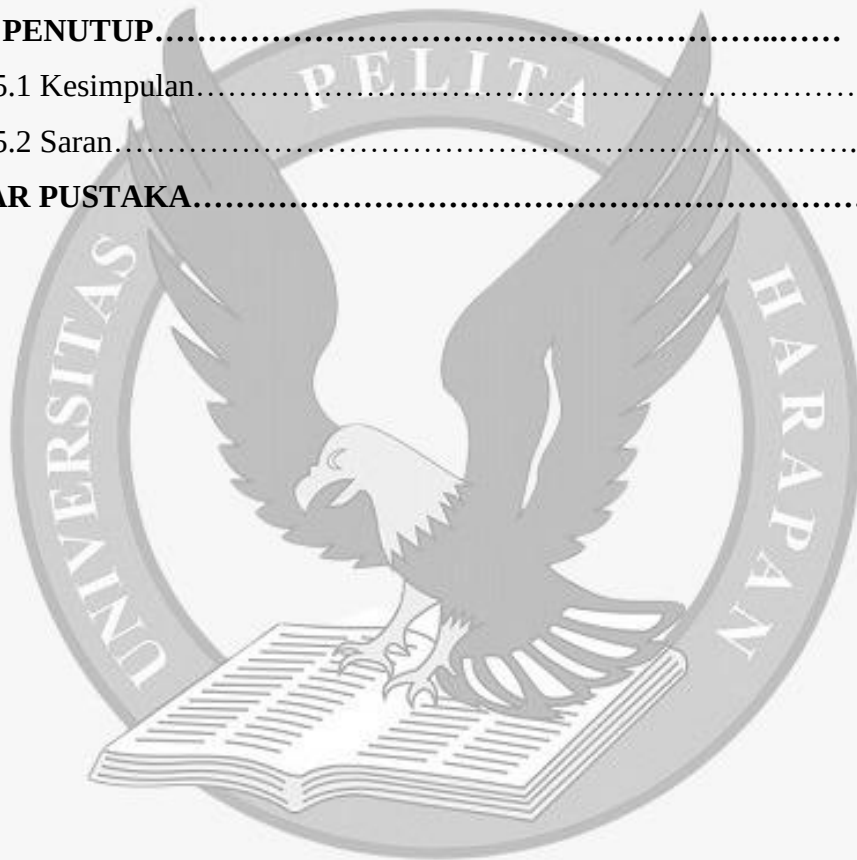
COVER DISERTASI.....	i
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING DISERTASI.....	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI SIDANG.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.4.1 Manfaat Teoretis.....	11
1.4.2 Manfaat Praktis.....	11
1.5 Orisionalitas/Keaslian Penelitian.....	13
1.6 Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
2.1 Landasan Teori.....	17
2.1.1 Teori Pidana.....	17
2.1.2 Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman.....	23
2.1.3 Teori Keadilan Bermartabat.....	27
2.2 Landasan Konseptual.....	32
2.2.1 Hukum Pidana.....	32
2.2.1.1 Konsep Hukum Pidana.....	33
2.2.1.2 Tindak Pidana.....	34
2.2.1.3 Kebijakan Hukum Pidana/Kebijakan Kriminal.....	40

2.2.1.4 Sistem Peradilan Pidana (SPP).....	44
2.2.2 Kejahatan Korporasi.....	51
2.2.2.1 Pengertian Korporasi.....	51
2.2.2.2 Kejahatan Korporasi.....	57
2.2.2.3 Karakteristik Kejahatan Korporasi.....	64
2.2.2.4 Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Korporasi	67
2.2.3 Pertanggungjawaban Hukum.....	70
2.2.3.1 Konsep Tanggungjawab dan Pertanggungjawaban Hukum.....	70
2.2.3.2 Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.....	73
2.2.3.3 Model Peranggungjawaban Pidana Korporasi.....	77
2.2.3.4 Tahapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi...	80
2.2.4 Hukum Ketenagakerjaan dan Pengupahan.....	83
2.2.4.1 Hukum Ketenagakerjaan.....	83
2.2.4.2 Pengupahan dalam Sistem Ketenagakerjaan.....	91
2.2.4.3 Asas Pengupahan dan Faktor Perbedaan Tingkat Upah.....	94
2.2.4.4 Jenis-Jenis Upah bagi Pekerja.....	102
2.2.5 Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana bagi Korporasi yang Membayar Upah Di Bawah Upah Minimum.....	104
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	108
3.1 Bentuk dan Pendekatan Penelitian.....	108
3.2 Bahan Hukum.....	109
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	111
3.4 Jenis Data.....	112
3.5 Pengolahan dan Analisis Data.....	113
BAB IV PEMBAHASA DAN ANALISA.....	117
4.1 Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi yang Membayar Upah di Bawah Upah Minimum di Indonesia.....	117
4.1.1 Pengaturan Tentang Pembayaran Upah oleh Korporasi di	

Indonesia.....	117
4.1.1.1 Ketentuan Tentang Pembayaran Upah Minimum	117
4.1.1.2 Upah Minimum dan Tujuan Penetapan Upah Minimum.....	128
4.1.1.3 Kebijakan Pengupahan di Indonesia sebagai Wujud Pemenuhan Hak Pekerja oleh Korporasi...	132
4.1.1.4 Perselisihan Hak Pada Sistem Pengupahan.....	136
4.1.1.5 Analisis Perbandingan Kebijakan Pengupahan dengan Negara Lain.....	140
4.1.2 Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Bagi Korporasi di Indonesia.....	154
4.1.2.1 Ketentuan Korporasi yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana.....	154
4.1.2.2 Perbuatan Korporasi yang Dapat Dimintakan Pertanggungjawaban Pidana.....	156
4.1.2.3 Analisis Perbandingan Pengaturan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana dengan Negara Lain.....	162
4.1.3 Pengaturan Sanksi Pidana Bagi Korporasi yang Membayar Upah di Bawah Upah Minimum.....	165
4.1.3.1 Sanksi Pidana Pokok Bagi Korporasi.....	165
4.1.3.2 Analisis Perbandingan Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dengan Negara Lain.....	172
4.1.3.3 Analisis Temuan.....	182
4.2 Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi yang Membayar Upah di Bawah Upah Minimum.....	189
4.2.1 Korporasi Menjadi Subjek Hukum yang Dimintai Pertanggungjawaban Pidana.....	189
4.2.2 Penanganan Tindak Pidana bagi Korporasi yang Membayar Upah di Bawah Upah Minimum.....	191

4.2.2.1 Pelaksanaan Proses Penyelidikan & Penyidikan Korporasi yang Membayar Upah di Bawah Upah Minimum.....	191
4.2.2.2 Pelaksanaan Penetapan Tersangka Korporasi yang Membayar Upah di Bawah Upah Minimum.....	194
4.2.2.3 Pelaksanaan Pemeriksaan Terhadap Tersangka Korporasi yang Membayar Upah di Bawah Upah Minimum.....	198
4.2.2.4 Pelaksanaan Upaya Paksa Terhadap Tersangka Korporasi yang Membayar Upah di Bawah Upah Minimum.....	200
4.2.2.5 Putusan dan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Bagi Korporasi yang Membayar Upah di Bawah Upah Minimum.....	203
4.2.3 Kendala-Kendala dalam Penyelesaian Perkara Pidana Korporasi yang Membayar Upah Di Bawah Ketentuan Upah Minimum.....	209
4.2.4 Analisis Putusan Pengadilan dalam Kasus Korporasi yang Membayar Upah Di Bawah Ketentuan Upah Minimum....	219
4.2.4.1 Analisis Putusan Nomor 1661/Pid.B/2015/PN.Lbp	219
4.2.4.2 Putusan PN Surabaya Nomor 714/Pid.Sus/2022/PN Sby.....	224
4.2.4.3 Putusan PN Cibinong Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Cbi.....	226
4.2.5 Analisis Temuan.....	238
4.3 Pengaturan Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Korporasi yang Membayar Upah Di Bawah Upah Minimum Berbasis Nilai Keadilan di Indonesia pada Masa Mendatang.....	243
4.3.1 Analisis Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi yang Berkeadilan.....	244
4.3.2 Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi yang	

Membayar Upah Di Bawah Upah Minimum.....	249
4.3.3 Konsepsi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi yang Membayar Upah di Bawah Upah Minimum yang Ideal di Indonesia.....	257
4.3.3.1 Konsepsi Pengaturan yang Berkeadilan melalui Ide Double-Tract System.....	256
4.3.3.2 Konsepsi Pengaturan yang Berkeadilan Melalui Penanganan Tindak Pidana Korporasi.....	263
BAB V PENUTUP.....	272
5.1 Kesimpulan.....	272
5.2 Saran.....	277
DAFTAR PUSTAKA.....	280



DAFTAR TABEL

1.1 Orisionalitas Penelitian.....	13
-----------------------------------	----



DAFTAR GAMBAR

1.1 Bagan Teori Sistem Hukum dalam Perspektif Lawrence M. Friedman.....	25
1.2 Bagan Lapisan-Lapisan dalam Ilmu Hukum.....	28
1.3 Bagan Kerangka Kerja Teori Keadilan Bermartabat.....	29

